

ABSTRAK

Hukum kepailitan adalah bagian dari kode sipil yang memiliki beberapa karakteristik khusus. hukum acara kepailitan memberikan batas waktu enam puluh hari dari pendaftaran harus menjadi keputusan pengadilan oleh Mahkamah Agung dan bukti sederhana. Pembuktian sederhana memiliki empat persyaratan yang harus dipenuhi secara kumulatif, adanya dua kreditor atau lebih, adanya utang, dapat ditagih, dan jatuh tempo. Namun, dalam prakteknya, penerapan pembuktian sederhana tidak mudah karena aturannya tidak baik. banyak kebangkrutan tidak dianggap masalah sederhana dengan pertimbangan hukum adalah *force majeure* dan *exceptio contractus adimpliti*. Oleh karena itu diperlukan, hukum pemerintahan yang baik untuk mengubah hukum kepailitan agar memperjelas definisi dari pembuktian sederhana.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Mengubah Tindakan

